

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : /

TAHUN 2006

## Tebang Pilih Balik Badan

CATATAN: ARIEF GUNAWAN



PRESIDEN SBY sedang menghadapi problem serius dalam masalah pencitraan diri. Maksud hati mau membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan men-

bahwa penuntasan kasus-kasus korupsi yang dilakukan saat ini sebenarnya bukan persoalan signifikan. Penanganan kasus-kasus korupsi tidak menjawab kebutuhan rakyat dan belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan. Tetapi memang presiden harus memulai dan menjaga citra sebagai presiden pilihan rakyat, meski kebijakan kabinetnya sering bertentangan dengan keinginan rakyat.

Problem lain yang dihadapi presiden adalah manuver politik yang dilakukan

orang-orang dekatnya. Sudah bukan rahasia rivalitas kekuasaan menjelang pemilu 2009 eskalasinya semakin tajam. Sehingga ada menteri yang ditumbalkan untuk merusak imej presiden.

Orang sekarang juga sudah mulai gemar memakai istilah "teori pembusukan" untuk ketidakompakan kabinet, atau untuk menunjukkan adanya kebijakan menteri yang merongrong imej presiden. Seperti halnya tuduhan yang dialamatkan kepada Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto yang menda-

dak menaikkan tarif tol.

Persoalan yang melibatkan Menseskab Sudi Silalahi dalam beberapa hari terakhir ini oleh sementara kalangan juga dianggap sebagai bagian dari upaya "pembusukan" terhadap presiden.

Kekuasaan yang rapuh sebenarnya akan busuk dengan sendirinya tanpa harus dibusuk-busukan. Di masa Pak Harto dulu ada sekelompok menteri yang dikategorikan sebagai Brutus, karena mereka begitu cepat "balik badan" saat mengetahui Pak Harto bakal jatuh.

Di masa Megawati juga ada menteri

yang "balik badan" begitu mengetahui popularitas dan dukungan terhadap Megawati mulai anjlok. Bahkan menteri ini langsung berlaga dalam pertaruhan pemilu presiden.

Problem serius yang dihadapi Presiden SBY berkaitan dengan menyusutnya popularitas dan pencitraan dirinya akibat banyaknya kebijakan yang tidak populis dan tidak pro-rakyat, adalah fenomena yang menarik untuk dicermati. Karena bukan tidak mungkin dekat-dekat pemilu 2009 nanti bakal banyak menteri yang "balik badan" untuk maju dalam pemilu presiden. ■

nuntaskan kasus-kasus korupsi, tetapi tudingan "tebang pilih" tidak bisa dihindari. Seperti diketahui, sejumlah kalangan menyebut presiden masih bersikap tebang pilih dalam menangani kasus-kasus korupsi.

Rupa-rupanya memang berat bagi presiden untuk kembali mendongkrak popularitas seperti saat pilpres yang lalu. Berbagai kebijakan yang tidak populis seperti kenaikan tarif tol, TDL, beras impor dan sebagainya telanjur menjadi ganjalan yang serius.

Di satu sisi presiden ingin membangun kembali pencitraan dirinya dengan merespon kasus-kasus korupsi, namun di lain sisi presiden harus berhadapan dengan respon-rakyat yang menolak berbagai kebijakan yang tidak populis yang dikeluarkan oleh kabinet sendiri.

Teman dekat saya, anggota tim sukses SBY pada pilpres yang lalu berpendapat



MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 4

TAHUN 2006

# Freeport dan Agenda Mahasiswa

Yusuf Maulana

Mantan aktivis mahasiswa; bekerja pada Institut Analisis Propaganda

Dalam sebuah seminar yang membahas penyebab menurunnya aktivitas gerakan mahasiswa, tokoh reformasi, Amien Rais, menyatakan bahwa mahasiswa sekarang makin dibelenggu kemewahan hidup akibat kapitalisme yang berkembang. Sebagai akademisi yang pernah bekerja sama dengan gerakan mahasiswa saat menumbangkan penguasa Orde Baru, tampaknya Amien amat merasakan telah berubahnya preferensi minat mahasiswa dalam beraktivitas.

Belakangan ini, dalam kapasitas sebagai sosok yang vokal menyuarakan adanya ketidakadilan dalam pengelolaan pertambangan—terutama yang dilakukan PT Freeport McMoran di Timika, Papua Barat—keprihatinan Amien terhadap gerakan mahasiswa sepertinya akan semakin bertambah. Hingga sepekan lebih upaya pemblokiran warga dan aksi solidaritas yang menyertainya, tidak banyak gerakan mahasiswa, yang menempatkan kejadian teraktual di Papua ini sebagai agenda aksinya.

Meskipun dampak pemblokiran jalan menuju lokasi pertambangan Freeport oleh masyarakat setempat—yang kemudian diikuti dengan aksi solidaritas warga Papua di Jakarta—terbilang besar, namun secara kepemilikan kejadian ini belumlah nasional. Dalam arti, kekecewaan dan protes warga Papua itu seolah-olah hanya milik mereka; bukan milik setiap warga di Republik ini.

Meskipun pemberitaan media massa atas kejadian ini meluas, respons masyarakat di negeri ini terkesan melokalkan persoalan: bahwa kejadian ini hanya sebagai persoalan warga Papua, atau sebuah persoalan rutinitas protes warga seperti juga sering terjadi di

daerah-daerah lain:

Ketidakadilan pembangunan memang tidak terjadi di lokasi pertambangan Freeport saja. Hampir di setiap lokasi pembangunan di negeri ini ketidakadilan selalu hadir di dalamnya. Tapi yang terjadi di Papua memiliki dimensi yang lebih kompleks dan implikasi yang lebih luas.

Adanya kepentingan korporasi asing—dengan dukungan kuat pemerintah negaranya selain dari pemerintah dan militer kita—menyebabkan ketidakadilan yang terjadi sebagai kejahatan "korporatokrasi". Wajar bila ada insiden yang awalnya kecil, secara eksponensial eskalasinya meninggi sehingga kejadiannya diarahkan ke upaya penginternasionalan.

## Respons mahasiswa

Kepasifan merespons kejadian pemblokiran di Papua tersebut terjadi pula

diamkan ketidakadilan yang diterima saudaranya di Papua?

Selain mengafirmasi tendensi dalam memilih dan mengartikulasikan isu publik, kenyataan ini juga menguatkan apa yang menjadi kekhawatiran Amien Rais seperti di awal artikel ini: belenggu kapitalisme sudah sedemikian rupa hadir di tengah gerakan mahasiswa (Islam), sehingga diam saja ketika mesin kapitalisme bernama Freeport menghisap kekayaan alam dan merusak lingkungan Papua.

Sebuah gerakan mahasiswa Islam terpancang lebih sibuk mengurus kongres dan berdebat mengenai calon ketua umumnya. Hingga kongres berakhir, tidak jelas bagaimana sikap politik dan solidaritas mereka dalam merespons pemblokiran warga Papua atas aktivitas Freeport.

Gerakan mahasiswa Islam lain yang bermassa banyak dan jaringannya

## Gerakan mahasiswa diam saja ketika mesin kapitalisme bernama Freeport menghisap kekayaan alam dan merusak lingkungan Papua.

di gerakan mahasiswa Islam. Yang menarik, pada saat yang sama, mayoritas umat Islam di negeri ini juga cenderung mendiamkan aksi warga Papua, meskipun mereka mayoritas juga tidak menyukai keberadaan Freeport di Papua.

Masih pasifnya umat Islam dan gerakan mahasiswanya, sama halnya dengan melokalkan kejadian di Papua sebagai persoalan yang hanya dimiliki warga Papua, betapapun ketidakadilan jelas-jelas hadir. Adakah persoalan psikis karena, katakanlah, perbedaan keyakinan sehingga melampaui solidaritas kebangsaan? Ataukah terselip pula persoalan ekonomis, bahwa karena yang langsung menikmati keberadaan Freeport (seolah-olah) hanya warga Papua, umat Islam di daerah lain kemudian cenderung men-

luas, yang biasanya aktif berdemonstrasi, masih berdiam diri hanya karena ketua umumnya mengundurkan diri. Tidak salah bila komitmen keislaman dan kebangsaan gerakan mahasiswa Islam patut dipertanyakan.

## 'Perang suci'

Menggunakan kalimat John Perkins dalam *Confessions of an Economic Hit Man* (2004), yang terjadi di Papua tidak lebih dari "sistem perdagangan kolonial yang berulang lagi, yang disiapkan untuk memudahkan mereka yang mempunyai kekuasaan dan sumber daya alam terbatas untuk mengeksploitasi mereka yang mempunyai sumber daya tetapi tidak mempunyai kekuasaan."

Seperti diakui oleh Perkins, dalam proses eksploitasi alam oleh negara

maju, ikut hadir pula apa yang disebutnya 'perang suci'. Menurut pengakuan Perkins, "tampak bagiku bahwa jika jihad ini terjadi, maka itu akan lebih sedikit berkenaan dengan orang Islam melawan orang Kristen daripada negara terbelakang melawan negara maju, barangkali dengan umat Islam di garis terdepan."

Jadi, dengan meminjam kerangka logis Perkins di atas, eksploitasi kekayaan alam di Papua sebenarnya tidak steril dari upaya pihak luar untuk memaksakan kepentingannya kepada umat Islam di republik ini. Alih-alih hanya sebagai persoalan warga Papua (berikut sistem kepercayaannya), keberadaan Freeport sejatinya memiliki persoalan yang lebih kompleks yang meliputi pula eksistensi umat Islam di daerah-daerah lain di republik ini.

Bila demikian koeksistensi persoalannya, mengapa umat Islam justru masih menyederhanakan setiap kejadian di Papua sebagai kejadian lokal?

Akibatnya, hari ini makin terasa umat Islam (juga gerakan mahasiswa Islam) terkotakkan dalam sebuah praktik diskursif memilih dan mengartikulasikan isu publik. Satu isu dipandang sebagai milik "orang lain"/"mereka"/*the others*, padahal isu itu juga miliknya, milik "kita".

Yang tengah terjadi di Papua saat ini sebetulnya berpotensi menjadi agenda bersama kelompok manapun. Sebab, kepentingan dan "musuh"-nya sama: neo-imperialisme. Terbilang ganjil bila gerakan mahasiswa Islam dalam kaitan ini terasa tertinggal dari gerakan mahasiswa berhaluan lain, terutama sosialis.

Bagaimanapun, bila menoleh ke catatan sejarah perlawanan atas praktik imperialisme di negeri ini, andil umat Islam bisa dikatakan terbesar, tanpa terkecuali ketika mendukung pembebasan Papua Barat dari kekuasaan Belanda. Hal kontradiktif ketika warga Papua masih dijajah, umat Islam memilih berdiam diri; gerakan mahasiswa Islam juga kebingungan mengambil inisiatif. ■

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input checked="" type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> UMUM									
JAN	FEB	<b>MAR</b>	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4	5 6 7 8	9 10 11 12	13 14 15 16	17 18 19 20	21 22 23 24	25 26 27 28	29 30 31				
HALAMAN : 19											TAHUN 2006

# Organda DKI Menolak Pengoperasian Bajaj BBG

JAKARTA - Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) DKI menolak rencana peremajaan bajaj lama dengan kendaraan sejenis, baik bajaj BBG (berbahan bakar gas) maupun bajaj rekondisi.

Menurut Ketua Unit MIMO dan Angkutan Organda DKI, Safruhan Sinungan, peremajaan bajaj dengan kendaraan sejenis bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 (Perda No 12/2003) dan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No 84 Tahun 2004 (SK Gub No 84/2004).

Safruhan mengatakan, Perda No 12/2003 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai, Danau serta Penyeberangan di DKI tidak memuat aturan tentang kendaraan roda tiga. Begitu juga SK Gub No 84/2004 tentang Pola Transportasi Makro di DKI.

"Pemprov DKI sudah mencanangkan program peremajaan bajaj dengan kendaraan mini roda empat yang ramah lingkungan. Kenapa program ini, tidak dioptimalkan. Kok, justru muncul rencana peremajaan bajaj dengan kendaraan sejenis yang tetap beroda tiga. Itu kan, ti-

dak konsisten," kata Safruhan, dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (1/3).

Dia menegaskan, Pemprov DKI harus merevisi atau mencabut Perda Nomor 12/2003, jika tetap mengizinkan peremajaan bajaj dengan bajaj BBG atau bajaj rekondisi. Hal itu, untuk mencegah timbulnya polemik dan kebangung-bangunan bagi pengusaha bajaj.

"Kami minta ketegasan Pemprov DKI. Jangan sampai di tengah jalan, ada lagi perubahan rencana dan kebijakan, sehingga pengusaha yang dirugikan," ujar Safruhan.

Hal senada dikatakan Sekretaris Organda DKI, TR Pandjaitan, yang mendampingi Safruhan. Menurut dia, Pemprov DKI seharusnya melibatkan asosiasi dan pengusaha bajaj ketika merencanakan atau membuat kebijak-

an menyangkut peremajaan kendaraan roda tiga itu.

Dia mengatakan, Pemprov DKI sebaiknya mendiskusikan jenis kendaraan yang cocok untuk menggantikan bajaj dengan para pengusaha dan asosiasi terkait. Dengan demikian, akan diperoleh kesepakatan dari sisi model dan harga yang menguntungkan semua pihak.

"Kalau asosiasi dan pengusaha tidak dilibatkan, peremajaan bajaj tidak berjalan optimal. Contohnya, kancil belum berhasil mengganti bajaj karena banyak pengusaha yang keberatan," kata Pandjaitan.

Dia menambahkan, Pemprov DKI seharusnya tidak membuat kebijakan mengenai peremajaan bajaj secara sepihak. Sebab, hasilnya tidak akan optimal, bahkan akan menambah persoalan

baru.

"Jangan sampai Pemprov DKI membuat kesalahan yang sama dengan merubah kebijakan, tapi tak ada hasilnya di lapangan. Siapa yang berani menjamin satu bajaj lama diganti dengan bajaj baru. Kalau tidak diawasi dan aturannya tidak tegas, Jakarta bisa dipenuhi bajaj," ujar Pandjaitan.

## Tanpa Izin

Sementara itu, Safruhan mempertanyakan pernyataan Kepala Dinas Perhubungan DKI, Nurachman, mengenai izin bajaj BBG yang sedang diproses. Sebab, Dishub DKI sudah tidak menerbitkan izin operasi bajaj, begitu program peremajaan bajaj ke kancil diluncurkan pada 2004.

"Kalau Dishub kembali menerbitkan izin operasi bajaj untuk melancarkan ber-

operasinya bajaj BBG, kita patut bertanya kenapa bisa begitu. Apalagi Polda Metro Jaya juga sudah tidak lagi menerbitkan SIM (Surat Izin Mengemudi, red) untuk pengemudi bajaj," kata Safruhan.

Dia menegaskan, pada prinsipnya Organda DKI yang mewakili pengusaha angkutan termasuk bajaj, menyetujui rencana Pemprov DKI untuk meremajakan kendaraan roda tiga itu.

Namun Organda tidak menyetujui jika peremajaan bajaj diganti dengan bajaj lain, apapun bentuknya. "Mau pakai BBG atau rekondisi, tetap saja bajaj. Dan itu, sudah tidak diatur sebagai angkutan umum di Jakarta. Jadi kami minta Pemprov tegas dengan kebijakan yang sudah dibuat," ujar Safruhan.

(J-9)

53

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input checked="" type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>	
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> UMUM
JAN    FEB <b>MAR</b> APR    MEI    JUN    JUL    AGST    SEPT    OKT    NOV    DES 1 2 3 ④ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN : 15 <span style="float: right;">TAHUN 2006</span>		

# Demo Freeport Berlanjut

Avtur di Bandar Udara Moses Kilangin Menipis

SOLO, KOMPAS — Gabungan Masyarakat Papua di Surakarta bersama mahasiswa yang tergabung dalam Front Anti Neoliberalisme, Jumat (3/3), berunjuk rasa mendukung perjuangan masyarakat Papua yang memprotes PT Freeport Indonesia. Unjuk rasa digelar di Bundaran Gladak, Solo, Jawa Tengah.

Sebelumnya pengunjuk rasa *long march* dari Kampus Universitas Sebelas Maret Surakarta di Mesen.

Dalam perjalanan menuju Gladak, massa meneriakkan yel-yel dan berorasi di titik tertentu, antara lain di depan Pasar Gede. Salah seorang wakil dari Masyarakat Papua di Surakarta, Yohannes Lani, mengatakan, pihaknya mendukung aksi yang dilakukan masyarakat Papua di berbagai kota lain. "Aksi ini tidak hanya dilakukan orang asli Papua, tetapi

juga orang non-Papua yang tinggal di Papua, seperti orang Jawa yang tinggal di Papua," katanya.

Menurut dia, masyarakat Papua di Surakarta menginginkan PT Freeport Indonesia (FI) ditutup. "Kami ingin agar TNI ditarik dari Timika, teman kami yang ditahan di Jakarta dilepaskan, dan penembakan terhadap penambang emas yang terjadi belum lama ini diusut tuntas," kata seorang anggota Masyarakat Papua di Surakarta, Ferdinand Manngsang.

Dalam kaitan itu, pakar politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti mengatakan, pemerintah harus berani menekan PT FI agar melakukan renegotiasi. Tujuannya, mencapai keadilan pembagian hasil dan mengakhiri pencemaran lingkungan.

Untuk mencapai hal itu, diusulkan agar PT FI melakukan pemrosesan produknya di Indonesia dan membangun instalasi pengolahan limbah.

## Diragukan

Ikrar meragukan laporan keuangan PT FI karena tanpa audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan atau Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. "Berapa sebetulnya produksi PT FI, baik mengenai jumlah emasnya, tembaganya, maupun produk sampingan lainnya.

BPK, departemen pertambangan, kita, tidak tahu," ujarnya.

Akibat aksi pemblokiran jalan ke arah penambangan PT FI di Timika, persediaan avtur di Bandar Udara (Bandara) Moses Kilangin, Timika, menipis. Mulai hari Jumat kemarin pengelola bandara tidak melayani pembelian avtur sehingga maskapai penerbangan seperti Garuda Indonesia dan Merpati Nusantara tidak bisa mengisi bahan bakar di Timika.

Karena itu, manajemen Garuda Indonesia memutuskan menutup sementara rute penerbangan Jayapura-Timika-Denpasar. Sementara itu, Merpati Nusantara Airlines berencana menaikkan tarif rute Jayapura-Timika-Makassar karena harus menambah transit untuk mengisi bahan bakar penerbangan ke Makassar. (ROW/WIN/EKI)